



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00- 18 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
FEZZI UKTOLSEJA



PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PD PENGUSUL	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5		6	7		8	9
1.	Perda	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 yaitu: - menghapus ketentuan Pasal 5 huruf J - menghapus ketentuan ketentuan Pasal 16	-	√	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah	-	√	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan I
2.	Perda	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	a. prinsip penyelenggaraan KLA b. strategi penyelenggaraan KLA c. pemenuhan hak anak d. penyelenggaraan KLA e. tanggungjawab pemerintah daerah f. peran serta masyarakat g. partisipasi anak h. penyelenggaraan layanan rumah anak	√	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang Nomor 23 Tahun 2002	√	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Triwulan I

			i. pembinaan dan pengawasan			tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak				
3.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan ketentuan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan I

						Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah				
4.	Perda	Pertanggungjawab an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan II
5.	Perda	Penyelenggaraan Program Jaminan	a. ketentuan umum b. program dan kepersertaan	√	-	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang	√	-	DPRD	Triwulan II

		Sosial Ketenagakerjaan	c. peran pemerintah daerah d. program perlindungan pekerja rentan e. pembinaan dan pengawasan f. pembiayaan g. sanksi			Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial				
6.	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2030	Penggambaran visi dan misi daerah selama 5 (lima) tahun yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan tahapan pembangunan jangka menengah	√	-	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencana Pembangunan Nasional	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan II
7.	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Menghapus ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggara pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan saran komunikasi	-	√	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	-	√	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Triwulan III
8.	Perda	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	a. Ketentuan umum b. Ruang lingkup riset c. Inovasi daerah d. Koordinasi dan sinkronisasi	√	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	√	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan III

			<ul style="list-style-type: none"> e. Ekosistem riset dan inovasi daerah f. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi g. Perlindungan hak kekayaan intelektual h. Penilaian dan penghargaan i. Penyebaran riset dan inovasi daerah j. Pendanaan riset dan inovasi daerah k. Pembinaan dan pengawasan 			<ul style="list-style-type: none"> undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Daerah 3. Peraturan BRIN Nomor 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi 				
9.	Perda	Strategi Promosi dan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum b. Tujuan dan sasaran promosi penanaman modal c. Strategi promosi penanaman modal d. Penyediaan sarana promosi e. Pelaksanaan kegiatan promosi f. Koordinasi promosi g. Peran dan tanggungjawab h. Ketentuan peralihan i. Ketentuan penutup 	√	-	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal 	√	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan III

10.	Perda	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peran Perusahaan dalam meningkatkan perekonomian daerah. - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. 	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	DPRD	Triwulan III
11.	Perda	Penyelenggaraan Perdagangan dan Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewenangan pemerintah daerah dalam perdagangan dan perindustrian b. Sarana perdagangan c. Pelayanan perizinan dan non perizinan d. Promosi dagang e. Stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting f. Standarisasi dan perlindungan konsumen g. Sistem informasi perdagangan dan perindustrian h. Pembinaan dan pengawasan 	√	-		√	-	Dinas perindustrian dan Perdagangan	Triwulan IV

12.	Perda	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV
13.	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV


 KETUA DPRD
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

 FEZZI UKTOLSEJA